

**PENGAJUAN PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG NOMOR 71/Pdt.G/2017/PN.Pdg jo PUTUSAN
TINGGI PADANG NOMOR 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2879K/Pdt/2018)**

Oleh:

Vidivicia Sukses Soenoe¹ dan Tata Wijayanta²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) kualifikasi pemaksaan dan ancaman yang membatalkan akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dan 2) pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2879K/PDT/2018 yang tidak membatalkan akta perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung wawancara narasumber yaitu, dua orang Notaris/PPAT dan seorang Hakim Pengadilan Negeri. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pemaksaan dan ancaman membatalkan perjanjian karena tidak sesuai dengan unsur subjektif mengenai kesepakatan. Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi untuk tidak membatalkan akta perdamaian karena memuat hak masyarakat hukum adat atas penjualan tanah pusaka tinggi.

Kesimpulan penelitian adalah 1) Kualifikasi paksaan dan ancaman dalam akta perdamaian adalah pada saat pembuatan perjanjian menimbulkan ketakutan secara fisik atau psikis yang tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian 2) Putusan Mahkamah Agung sudah tepat untuk tidak membatalkan akta perdamaian dengan memandang segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sedangkan saran yang diberikan yaitu 1) notaris sebaiknya melakukan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui terjadi paksaan dan ancaman pada pembuatan akta perdamaian 2) Mahkamah Agung diharapkan membuat yurisprudensi tentang paksaan dan ancaman yang tidak diatur dalam KUHPerdara.

Kata Kunci: Akta perdamaian, Paksaan, Notaris

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (vidivicia@mail.ugm.ac.id)

² Dosen/Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (wijayanta@mail.ugm.ac.id)

**SUBMISSION OF THE CANCELLATION OF MEDIATED
SETTLEMENT AGREEMENT MADE IN FRONT OF A NOTARY
(STUDY OF DISTRICT COURT OF PADANG DECISIONS NUMBER
71/Pdt.G/2017/PN.Pdg jo HIGH COURT OF PADANG DECISION
NUMBER 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo VERDICTS SUPREME COURT
DECISION NUMBER 2879K/Pdt/2018)**

**By :
Vidivicia Sukses Soenoe* and Tata Wijayanta**⁴**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze 1) the qualifications of coercions and threats that annul the mediated settlement agreement made in front of a notary and 2) the judge considerations on the high court of Padang decision number 25/Pdt/2018/PT.Pdg jo the supreme court decision number 2879K/PDT/2018 which does not annul the mediated settlement agreement. This research is a normative juridical research supported by the interviews with informants, two notaries/PPAT and a district court judge. The research materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection methods used is document studies. The data were analyzed qualitatively and presented in descriptive qualitative analysis.

The result and the discussions of this research shows that coercions and threats annul the agreement because it is not suitable with subjective elements in the agreement. The supreme court's decision upheld the high court's decision decision not to annul the mediated settlement agreement because it contained the rights of indigenous people of selling the heritage land.

This research shows that 1) the qualifications of coercions and threats in mediated settlement agreement are when in the making process of agreement creates physical of physiological fear that is not suitable with the legal terms of the agreement 2) the supreme court's decision is appropriate not to cancel the mediated settlement agreement by looking all aspects includes juridicals, philosophicals, and sociologicals. While the suggestions given are 1) the notary should conduct a direct examination to find out the occurrence of coercions and threats in the process of making agreement 2) the supreme court is expected to make jurisprudence regarding the coercion and threats that are not regulated in the civil code.

Keywords : mediated settlement agreement, coercion, notary

*³ Master of Notary Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University (vidivicia@mail.ugm.ac.id)

** Lecturer/Professor in Faculty of Law, Gadjah Mada University (wijayanta@mail.ugm.ac.id)